

PENGARUH DANA TRANSFER PUSAT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN

Muhammad Hasan

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Email : hasdiansa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh transfer pusat sebagai variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat melalui belanja modal sebagai variabel perantara. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan model persamaan regresi panel data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terkait transfer pusat, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dana transfer pemerintah pusat yang terdiri dari DAU, DBH dan suku bunga berpengaruh positif terhadap belanja modal, tetapi DAK berpengaruh negatif terhadap belanja modal, (2) belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan; dan (3) dana transfer pemerintah (DAU) pusat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal dan DBH serta DAK dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

Kata Kunci : Transfer Pusat, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal

EFFECT OF TRANSFER FUNDS AGAINST ECONOMIC GROWTH CENTER DISTRICT/CITY IN SOUTH SULAWESI

Muhammad Hasan

Faculty of Economics University of Makassar

Email : hasdiansa@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to assess the effect of the transfer center as independent variables on economic growth as the dependent variable through capital expenditures as intermediate variables. This study is a quantitative study using data panel regression model. The data used in this study is related secondary data center transfers, economic growth and capital expenditures district/city of South Sulawesi Province. These results indicate that (1) the central government transfers funds consisting of DAU, DBH and interest rates positive effect on capital expenditure but DAK negative effect on capital expenditures; (2) capital expenditures and significant positive effect on economic growth districts/cities in South Sulawesi; and (3) government transfers funds (DAU) center positive effect on economic growth through capital expenditures and DBH and DAK and interest rates negatively affect economic growth through capital expenditures.

Key Words : Transfer Center, Economic Growth and Capital Expenditures

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004, telah membawa perubahan dalam sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. Terjadi pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam berbagai bidang. Dengan adanya otonomi daerah maka desentralisasipun terjadi, baik yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi dan perencanaan yang lain semuanya dilimpahkan dari pusat ke daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan penggunaan transfer dana perimbangan maupun dana yang bersumber dari pendapatan daerah atau penerimaan daerah yang sah.

Transfer pemerintah pusat ini merupakan salah satu sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang nantinya akan dilaporkan dalam perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah mengurangi kesenjangan fiskal antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh daerah (Simanjuntak, 2001).

Transfer dana desentralisasi ini dilakukan dengan mekanisme Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam beberapa tahun berjalan dari tahun 2005-2010, proporsi dana perimbangan di Sulawesi Selatan terhadap penerimaan daerah masih cukup tinggi dibandingkan penerimaan yang lain.

Pada tahun 2005 transfer dana yang diterima Sulawesi Selatan sebesar Rp 4,927,576; tahun 2006 sebesar Rp 7,457,970; pada tahun 2007 sebesar Rp 8,674,330; tahun 2008 sebesar Rp 9,551,963; pada tahun 2009 sebesar Rp 9,571,311 dan pada tahun 2010 sebesar Rp 10,275,505. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketergantungan Sulawesi Selatan terhadap transfer dana dari pusat masih cukup tinggi. Ketergantungan seperti ini harus dikurangi agar pelaksanaan desentralisasi dapat benar-benar terwujud.

Dalam teori pertumbuhan endogen, pengeluaran pemerintah memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan dapat menstimulus perekonomian. Misalnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan memperkecil kemiskinan.

Penggunaan dana perimbangan yang saat ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah, membuat pemerintah daerah memegang peranan penting. Kemana dana perimbangan akan dialokasikan dan didistribusikan sangat mempengaruhi manfaat dari dana perimbangan tersebut. Saat pemerintah daerah memutuskan untuk melakukan alokasi ke belanja modal melalui pembangunan infrastruktur, maka dana perimbangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena dengan adanya infrastruktur yang baik maka akan mengundang minat para investor yang secara umum membantu menggiatkan kegiatan ekonomi, dan selanjutnya tentu saja membuka berbagai lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran. Belanja modal merupakan salah satu komponen yang dapat di andalkan dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Begitupun pada pemerintah Sulawesi Selatan yang lebih cenderung mengalokasikan dana perimbangan pada belanja pegawai.

Pada tahun 2005 belanja yang dialokasikan pemerintah untuk belanja pegawai sebesar 45.49 % dan belanja modal hanya sebesar 22.06 % dan pada tahun 2010 alokasi

belanja pegawai sebesar 48.57 % meningkat sebesar 3.08 % dan belanja modal sebesar 22.36 % naik sebesar 0.30 %. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Sulawesi Selatan mulai meningkatkan alokasi dana pada belanja modal, walaupun masih relatif kecil. Transfer pusat seharusnya dioptimalkan untuk memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan sektor produktif di daerah.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Sebab, dengan semakin tingginya belanja modal maka akan semakin tinggi pula produktivitas ekonomi. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Dalam era otonomi masing-masing daerah berlomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Kemampuan daerah untuk tumbuh sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang adakalanya satu sama lain saling mempengaruhi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui pengaruh dana transfer pemerintah pusat dan suku bunga terhadap belanja modal di kabupaten/kota Sulawesi Selatan; (2) mengetahui pengaruh belanja modal pemerintah pusat terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Sulawesi Selatan; dan (3) mengetahui pengaruh dana transfer pemerintah pusat dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Sulawesi Selatan melalui variabel belanja modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh transfer pusat sebagai variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat melalui belanja modal sebagai variabel perantara.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD yang ada di Sulawesi Selatan tahun 2005-2010. Penelitian ini menggunakan 24 sampel yang terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 Kota di Sulawesi Selatan, sehingga jumlahnya (24 dikali 6 tahun = 144 sampel).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh bersumber dari : 1) Data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada kurun waktu tahun 2005-2010 bersumber dari kantor BPS Propinsi Sulawesi Selatan, 2) Data Dana Alokasi Umum pada kurun waktu tahun 2005-2010 bersumber dari kantor BPS Propinsi Sulawesi Selatan, 3) Data Dana Bagi Hasil pada kurun waktu tahun 2005-2010 bersumber dari kantor BPS Propinsi Sulawesi Selatan, 4) Data Belanja Modal pada kurun waktu tahun 2005-2010 bersumber dari kantor BPS Propinsi Sulawesi Selatan.

Data yang diperoleh untuk penelitian ini diperoleh dari hasil studi pustaka dan teknik dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik analisa untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dan lain-lain yang masih relevan, dan teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan obyek studi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model persamaan regresi panel data. Model persamaan regresi panel data dan 2SLS (dua tahap) yang menggambarkan hubungan antara Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil serta Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen terhadap variabel perantara yakni Belanja Modal, sehingga dapat digunakan untuk menafsirkan nilai Y apabila variabel X diketahui dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

$$Y_{Dt} = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + \alpha_3 X_{3it} + e \quad (1)$$

Dimana :

- Y = Indeks Belanja Modal
- X₁ = Indeks Dana Alokasi Umum
- X₂ = Indeks Dana Bagi Hasil
- X₃ = Indeks Dana Alokasi Khusus
- α = Koefisien Regresi
- e = Tingkat Kesalahan
- i = Kabupaten/Kota
- t = Tahun

Dimana rumus untuk menghitung indeks Belanja Modal (BM), DAU, DBH, DAK sebagai berikut :

$$\text{Indeks BM} = \frac{\text{Total BM}_i}{\text{Total Belanja Pemerintah}}$$

$$\text{Indeks DAU} = \frac{\text{DAU}_i}{\text{DAU Rata-rata Sulsek}}$$

$$\text{Indeks DBH} = \frac{\text{DBH}_i}{\text{DBH Rata-rata Sulsek}}$$

$$\text{Indeks DAK} = \frac{\text{DAK}_i}{\text{DAK Rata-rata Sulsek}}$$

Untuk melihat pengaruh belanja modal dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi, formulasinya sebagai berikut :

$$Z = f(Y, R)$$

$$Z_{it} = \beta_0 + \beta_1 Y_{it} + \beta_2 R + e_1 \quad (2)$$

$$= \beta_0 + \beta_1 [\alpha_0 + \alpha_1 X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + \alpha_3 X_{3it} + e] + \beta_2 R + e_1$$

$$= \beta_0 + \beta_1 \alpha_0 + \beta_1 \alpha_1 X_{1it} + \beta_1 \alpha_2 X_{2it} + \beta_1 \alpha_3 X_{3it} + \beta_1 e + \beta_2 R + e_1$$

Keterangan :

- Z = Pertumbuhan Ekonomi
- β = Koefisien Regresi
- Y = Indeks Belanja Modal
- R = Suku Bunga
- i = Kabupaten/Kota
- t = Tahun
- e = Tingkat Kesalahan

Sehingga untuk melihat pengaruh DAU, DBH, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi melalui variabel belanja modal formulasi yang digunakan seperti berikut :

$$Z_{it} = \rho_0 + \rho_1 X_{1it} + \rho_2 X_{2it} + \rho_3 X_{3it} + \rho_4 R + e_2$$

Dimana : $\rho_0 = \beta_0 + \beta_1 \alpha_0$

$$\rho_1 = \beta_1 * \alpha_1$$

$$\rho_2 = \beta_1 * \alpha_2$$

$$\rho_3 = \beta_1 * \alpha_3$$

$$\rho_4 = \beta_2$$

$$e_2 = \beta_1 e + e_1$$

Keterangan :

Z = Pertumbuhan Ekonomi

ρ = Koefisien regresi

X_1 = Indeks Dana Alokasi Umum

X_2 = Indeks Dana Bagi Hasil

X_3 = Indeks Dana Alokasi Khusus

e = Tingkat kesalahan

HASIL PENELITIAN

Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Suku Bunga terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 0.053087, dengan tingkat signifikan adalah 5 % ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti bahwa dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (*ceteris paribus*), maka setiap kenaikan satu persen DAU akan meningkatkan 0.053087 persen Belanja Modal di Sulawesi Selatan.

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 0.189281 dengan tingkat signifikan adalah 5 % ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti bahwa dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (*ceteris paribus*), maka setiap kenaikan satu persen DBH akan meningkatkan 0.189281 persen Belanja Modal di Sulawesi Selatan.

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah -0.000232 dengan tingkat signifikan adalah 5 % ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti bahwa dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (*ceteris paribus*), maka setiap kenaikan satu persen DAK akan menurunkan -0.000232 persen Belanja Modal di Sulawesi Selatan.

Hal ini sejalan dengan teori Pengeluaran Pemerintah yaitu dengan meningkatnya pendapatan pemerintah maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun meningkat. Menurut Wagner (hukum Wagner) bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Alfian H. Harahap tahun 2009, Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal. Variabel yang digunakan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil SDA dan Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel independen berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Suku Bunga sebesar 0.097050 dengan tingkat signifikan adalah 5 % ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti bahwa dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (*ceteris paribus*), maka setiap kenaikan satu persen Suku Bunga akan meningkatkan 0.097050 persen Belanja Modal di Sulawesi Selatan.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Belanja Modal adalah 0.060560, dengan tingkat signifikan adalah 5 % ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti bahwa dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (*ceteris paribus*), maka setiap kenaikan satu persen Belanja Modal akan meningkatkan 0.060560 persen Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.

Penelitian yang dilakukan Gunawan Wahyudi Septian tahun 2008, Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Belanja Modal, dan Belanja Modal juga akan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan melalui Belanja Modal

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 0.629336, dengan tingkat signifikan adalah 5 % ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti bahwa dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (*ceteris paribus*), maka setiap kenaikan satu persen DAU akan meningkatkan 0.629336 persen Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Dana Bagi Hasil (DBH) adalah -0.066022, dengan tingkat signifikan adalah 5 % ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti bahwa dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (*ceteris paribus*), maka setiap penurunan satu persen DBH akan menurunkan 0.066022 persen Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah -0.060603, dengan tingkat signifikan adalah 5 % ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti bahwa dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (*ceteris paribus*), maka setiap penurunan satu persen DAK akan menurunkan 0.060603 persen Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friska Sihite tahun 2009, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, namun variabel Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini mendukung teori pertumbuhan Neo Klasik yang beranggapan bahwa modal akan mempercepat pertumbuhan.

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Suku Bunga sebesar -0.027049 dengan tingkat signifikan adalah 5 % ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti bahwa dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (*ceteris paribus*), maka setiap penurunan satu persen Suku Bunga akan meningkatkan 0.097050 persen Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.

Penyebab utama rendahnya suku bunga saat ini adalah tingkat Inflasi tahunan yang rendah. Ini yang menyebabkan Bank Indonesia berani terus menurunkan Suku Bunga, bukan karena desakan berbagai pihak agar Bank Indonesia menurunkan Suku Bunga. Bank Indonesia akan selalu menggunakan *positive real interest rate* dalam kebijakan moneter. Kebijakan *positive real interest rate* adalah kebijakan yang menjaga Suku Bunga Nominal yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat Inflasi. Sehingga pada saat Pertumbuhan Ekonomi rendah maka Inflasi akan rendah, lalu Suku Bunga akan direndahkan untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh tinggi maka akan terjadi Inflasi, lalu Suku Bunga harus dinaikkan kembali agar ekonomi dapat dikendalikan. Semakin rendah tingkat bunga yang harus dibayar para pengusaha, semakin banyak usaha yang dapat dilakukan para pengusaha. Semakin rendah tingkat bunga semakin banyak investasi yang dilakukan para pengusaha (Sukirno, 1998).

Perbandingan Signifikansi Dana Transfer dan Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan melalui Belanja Modal

Dari hasil analisis regresi dengan menggunakan panel data dan 2SLS mengenai besaran pengaruh masing masing dependen variabel (Dana Transfer dan Suku Bunga) terhadap variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi) melalui Belanja Modal, maka

diperoleh hasil bahwa DAU memiliki besaran koefisien sebesar 0.629336, DBH memiliki koefisien sebesar -0.066022, DAK memiliki koefisien sebesar -0.060603 dan Suku Bunga memiliki koefisien sebesar -0.027049 dengan tingkat probabilitas masing-masing yaitu DAU dan Suku Bunga sebesar 0.000, sedangkan DBH sebesar 0.0679 dan DAK sebesar 0.0544.

Hal ini membuktikan bahwa untuk Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2005-2010 lebih dipengaruhi oleh Dana Transfer (DAU, DBH, DAK). Dengan kata lain tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terhadap besarnya Dana Transfer pusat ke daerah masih sangat besar atau pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih belum mandiri dalam memenuhi kebutuhannya.

PENUTUP

Simpulan

1. Dana transfer pemerintah pusat yang terdiri dari DAU, DBH dan suku bunga berpengaruh positif terhadap belanja modal, tetapi DAK berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Lewat pengujian regresi panel terlihat signifikansinya lebih dari 0.05. Ini membuktikan bahwa dana transfer (DAU dan DBH) dan suku bunga signifikan mempengaruhi belanja modal.
2. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sulawesi Selatan.
3. Dana transfer pemerintah pusat (DAU) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal dan DBH serta DAK dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Dengan menggunakan metode pengujian 2SLS terlihat signifikansinya lebih kecil dari 0.05, hasil ini membuktikan bahwa dana transfer tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan melalui belanja modal. Bisa saja ini dikarenakan alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah relatif lebih kecil dibandingkan dengan alokasi ke belanja pemerintah yang lain.

Saran

1. Pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan pengeluaran untuk meningkatkan fasilitas publik dan fasilitas modal yang dapat meningkatkan investasi daerah. Pembangunan infrastruktur akan berdampak pada peningkatan investasi sehingga pendapatan masing-masing daerah dapat meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan masing-masing daerah akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas pembangunan daerah secara optimal atas sektor-sektor pembangunan. Karena dengan adanya penetapan skala prioritas pembangunan ini akan mampu memberikan efek multiplier terhadap perekonomian masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
3. Pemerintah daerah tetap perlu lebih memperbesar porsi belanja modal dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Dengan perkembangan proporsi alokasi belanja modal yang semakin baik pada anggaran pengeluaran kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan, maka akan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu.
- Bastian, Indra. 2002. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE UGM, dan Pusat Pengembangan Akuntansi. UGM.

- Bird, R.M. dan Vaillancourt, Francois. 1998. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*. Alih Bahasa Almizan Ulfa. P.T. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Blakley, E. (1989). *Planning Local Economic Development : Theory and Practices*. California : Sage Publication, Inc.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Magister Sains Ilmu-ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta.
- Fisher, R. C. 1996. *State and Local Public Finance*, Richard D. Irwin, Chicago.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- H. Harahap, Alfian. 2009. *Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal*. USU Library.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan PerKapita*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S, & Schuyley Tilly. 1994. *Intertempora Analysis of State An Local Government Spending : Theory and Tests*. Journal of Urban Economics 35 : 159-174.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/29/> akses 7 April 2014
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/56/> akses 7 April 2014
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/regulation/26/tahun/2009/bulan/02/tanggal/27/id/209/> akses 7 April 2014
- Ismerdekaningsih, Herlina, SE & Endah Sri Rahayu. 2002. *Analisis Hubungan Penerimaan Pajak terhadap Product Domestic Bruto Di Indonesia (Studi Tahun 1985-2000)*. ITB Central Library.
- Isti'anah. Essay : *Optimalisasi Peran Dana Bagi Hasil dalam Pembangunan Daerah*.
- Kuncoro, Haryo. (2004). *Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Vol. 9, No. 1
- LP EM FE-UI. 2001. *Dampak Penerimaan Dana Perimbangan dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) dan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Perekonomian Daerah*. Laporan hasil penelitian.
- Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Makalah. Disampaikan dalam seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A. 1983. *Who Should Tax, Where and What ?* Dalam Wallace E Oates (Ed) *The Economics of Fiscal Federalism and Local Finance*. Edward Elgar, Centelham, United Kingdom.
- Nordiawan, Deddi. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- PP No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Prakosa, Kesit Bambang. (2004). *Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY*. JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Saragih, Juli Panglima. 2005. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sidik, M. 2001. *Studi Empiris Desentralisasi Fiskal : Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi Daerah*, Makalah Seminar pada Sidang Pleno ISEI ke IX, 13-14 April 2001 di Batam.
- Sihite, Friska. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*.
- Simanjuntak, Robert. 2001. *Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization: A One Day Conference*. LPEM-UI. Jakarta.
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Umar, Husein. 2003. *Research Methods in Finance and Banking*. P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Wahyudi Septian, Gunawan. 2008. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia*.